

LAPORAN SEKTOR Badan Kepegawaian Daerah Januari 2017 SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

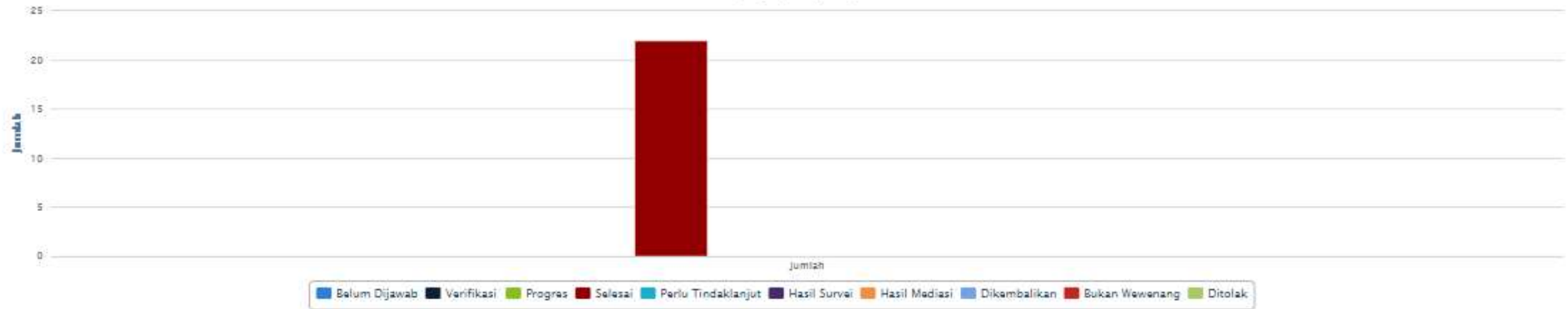
NO	NAMA	LAPORAN	WAKTU	TANGGAPAN	STATUS
1	Agus Surono (agusxxxxxxxx)	Aslmkum wr wb Bapak Gubernur, Mau tanya tentang TPP Pemprov, untuk PNS lama dan PNS paru per 16 Oktober 2016...apakah sama...terima kasih pencerahannya	02-01-2017 11:52	Terimakasih laporannya... kami teruskan ke yang menangani njih Untuk TPP ada aturan yang mengaturnya	Laporan Selesai
2	kumnadi (kus_nxxxxxxxx)	Mohon.Tpp pegawai eks kab.yang dialihkan ke pemprov jateng jangan bedakan dgn pegawai prov yg lama..2017 pasalnya ada info tpp gol 3 pegawai pengalihan dr kab sebesar 850000.. Demikian dari kami.barokallahu fiikum Pak Gubernur	10-01-2017 14:42	Terimalasih Laporannya kami teruskan ke yang menangani Terimakasih Pertanyaannya, Untuk TPP peralihan dari Kab/Kota ke Prov, belum ditetapkan, masih menunggu kajian2 lebih lanjut	Laporan Selesai
3	Fajar setiadi (fajarxxxxxxxx)	Aslmkum.Yth Bpk Gubernur Jateng.mau konsultasi sebelumnya saya bekerja di kantor Bakorwil 1 Prov Jateng di Pati .status saya sebagai karyawan kontrak outsourcing yg di pekerjaan sebagai administrasi.administrasi berjumlah 7 orang outsourcing.akhir desember 2017 kemarin bakorwil1 sudah dihapuskan.status kita dirumahkan dan menunggu kepastian mau dialihkan dimana? Kami semua sdah berkeluarga, mohon supaya nasib kami bisa di pertimbangkan, matusuwun	13-01-2017 10:52	Terimakasih laporan akan kami teruskan ke bidang yang nangani Waalaikum salam wr wb Terkait tenaga outsourcing, dalam bekerjasama ada kontrak yang ditanda tangani yang berbatas waktu, Coba tanyakan pada perusahaan anda menginduk outsourcing, karena secara kelembagaan SKPD Bakorwil juga sudah tidak ada lagi. Tetap semangat...	Laporan Selesai
4	Fajar setiadi (fajarxxxxxxxx)	Aslmkum.Yth Bpk Gubernur Jateng.mau konsultasi sebelumnya saya bekerja di kantor Bakorwil 1 Prov Jateng di Pati .status saya sebagai karyawan kontrak outsourcing yg di pekerjaan sebagai administrasi.administrasi berjumlah 7 orang outsourcing.akhir desember 2016 kemarin bakorwil1 sudah dihapuskan.status kita dirumahkan dan menunggu kepastian mau dialihkan dimana? Kami semua sdah berkeluarga, mohon supaya nasib kami bisa di pertimbangkan, matusuwun	16-01-2017 18:30	Terimakasih laporan akan kami teruskan yang menangani Terimakasih pertanyaannya, terkait tenaga outsourcing, dalam perjanjian kerja yang anda tanda tangani pasti ada batas waktunya, dan disitu ada klausul-klausul yang harus dipahami. Tetap semangat, tanyakan pada perusahaan yang menjadi induk outsourcing anda.	Laporan Selesai

5	Ika Rahma (08529xxxxxxxx)	Mohon dengan sangat ada pertimbangan untuk besaran TPP PNS peralihan untuk disamakan dengan PNS Pemprov asli karena kinerja sama dan melaksanakan amanat UU dengan segala konsekuensi termasuk jauh dari keluarga. Supaya suami2 kami tetap semangat dalam bekerja. Terimakasih	16-01-2017 19:41	terimakasih akan kami teruskan ke yang menangani Terimakasih pertanyaannya, terkait PNS yang alih status ke Provinsi Jawa Tengah, TPP adalah bukan HAK, namun TPP diberikan berbasis kinerja, dimana diperhitungkan dengan kehadiran, kinerja yang dijalani dan lain-lain yang menjadi perhitungan. Sedangkan besaran masih belum ditetapkan, demikian terimakasih	Laporan Selesai
6	Dwi (Hery.xxxxxxxx)	Asslmk, pak gub yg di rakhmati Allah, terkait peraturan pakaian dinas di lingkungan pemprov jateng terutama bagi yg berjilbab, di tentukan jilbab harus di masukan ke dlm baju, hal ini menjadi dilema dikalangan pegawai berjilbab. di satu sisi itu adalah peraturan yg dibuat, di sisi lain ada kewajiban yg lbh besar yaitu mengikuti perintah agama, bahwasanya berjilbab tdk hanya sekedar berjilbab tetapi ada aturannya, berjilbab harus menutupi dada. Kami berharap ada kebijakan dr pak gub yg bs menyelesaikan polemik ini. haruskah kami berjilbab sesuai peraturan gubernur tetapi kami harus melanggar aturan agama. mohon petunjuknya. terimakasih	18-01-2017 21:37	terimakasih akan kami teruskan ke bidang yang menangani Terima Kasih Terkait penggunaan pakaian dinas PNS Provinsi Jawa Tengah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian dinas lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2013 . Penggunaan pakaian dinas berlaku untuk seluruh PNS, CPNS dan Pegawai Tidak Tetap . Pengaturan penggunaan pakaian dinas berfungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai, khusus untuk wanita muslim berhijab dimasukkan ke dalam baju. Demikian harap maklum	Laporan Selesai
7	Novita oshinta dewi (08587xxxxxxxx)	Mohon info tes kesehatan CPNS untuk pemberkasan PNS golongan II kenapa bayar sendiri sedangkan untuk golongan III ditanggung pemerintah?? Padahal di PP no. 26 tahun 1977 disebutkan akan ditanggung negara tidak membedakan golongan. Mohon info kemana kita harus meminta penjelasan pak??	27-01-2017 13:56	peraturan tersebut yang mengeleuarkan kemenkes waktu itu, hanya sampai dengan sekarang BKD kurang mengikuti Perkembangannya Silahkan dikomunikasikan dengan Dinas Kesehatan apakah ada Anggarannya, karena sesuai dengan PP No.26 Tahun 1977 anggaran ada di Kemenkes	Laporan Selesai

8	Novita oshintadewi (08587xxxxxxx)	Mohon info tes kesehatan CPNS untuk pemberkasan PNS golongan II kenapa bayar sendiri sedangkan untuk golongan III ditanggung pemerintah?? Padahal di PP no. 26 tahun 1977 disebutkan akan ditanggung negara tidak membedakan golongan. Mohon info kemana kita harus meminta penjelasan pak??	27-01-2017 13:56	Terimakasih laporannya, bisa dijelaskan anda CPNS mana Kab/Kota di mana ?Apa Provinsi ? Sebagaimana PP No.26 Tahun 1977 Biaya dari Departemen Kesehatan, Sepengetahuan kita juga Apabila Dianggarkan dpt untuk membantu, namun apabila tidakdianggarkan, ya memang harus membayar. demikian untuk di OPD Prov. Jateng mereka juga bayar sendiri, karena OPD yg ada di Prov.Jateng tidak menganggarkan. Tetap Semangat... selamat menjadi PNS , Tunjukkan Pengabdian anda	Laporan Selesai
---	--------------------------------------	--	---------------------	---	-----------------

Grafik Berdasarkan Status Pelaporan

Source: laporgub.jatengprov.go.id



No.	Status Laporan	Jumlah
1	Belum Dijawab	0
2	Verifikasi	0
3	Progres	0
4	Selesai	22
5	Perlu Tindaklanjuti	0
6	Hasil Survei	0
7	Hasil Mediasi	0
8	Dikembalikan	0
9	Bukan Wewenang	0
10	Ditolak	0
Total		22